

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Tiongkok merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur. Total penduduk Tiongkok sejumlah 1.373.541.278 jiwa sehingga negara ini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Selain itu, negara ini juga menempati urutan tertinggi di dunia dalam pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 7% per tahun. Keberhasilan ekonomi Tiongkok ini tidak lepas dari keseriusan pemerintah dan sejarah panjang dalam menangani permasalahan ekonomi.

Pada kepemimpinan Deng Xiaoping, pemerintah menerapkan manajemen ekonomi desentralisasi dan perencanaan jangka panjang yang rasional serta fleksibel agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien dan terkontrol. Tidak hanya itu saja, Deng Xiaoping juga memperkuat hubungan perdagangan dan budaya Tiongkok dengan internasional melalui dibukanya pintu ekonomi bagi perusahaan dan investasi asing pada tahun 1979. Kebijakan ini memberikan dana yang dibutuhkan oleh Tiongkok untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak investor asing masuk dan menanamkan modalnya di Tiongkok sehingga banyak pula perusahaan multinasional yang berdiri.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkat pula kadar polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. *Haze pollution* yang terjadi di Tiongkok telah menjadi masalah utama dan merupakan paradok bagi industry di Tiongkok. Sejak tahun 1978, lingkungan hidup yang ada di Tiongkok telah mengalami penurunan kualitas menjadi buruk secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok telah melakukan pembangunan industri besar-besaran yang dimana bertujuan untuk memajukan negara itu sendiri. Urbanisasi dan

industrialisasi yang cepat telah menghasilkan sejumlah besar polusi udara dan air, serta juga menurunkan kualitas dari udara dan air tersebut.

Perusahaan multinasional diibaratkan seperti dua sisi mata uang koin yang dimana memiliki sisi terang dan gelap. Sisi baik dari perusahaan multinasional yang paling menguntungkan bagi negara *host-country* adalah dapat meningkatkan pertumbuhan negara tersebut. Banyaknya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat *host-country* membuat negara tersebut dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya perusahaan multinasional juga dapat membangkitkan semangat industri lokal yang dimana hal ini dapat menghidupi pekerjaannya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik serta dapat memperbesar *business networking* mereka melalui kerjasama yang dilakukan antara industri lokal dengan perusahaan multinasional.

Akan tetapi, tidak selamanya kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa perusahaan multinasional juga memiliki sisi gelap atau buruk. Tingginya emisi gas karbon di Tiongkok salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya penggunaan batubara di negara tersebut. Batubara menjadi salah satu sumber energi yang banyak digunakan oleh negara maju yang tidak memiliki minyak bumi. Hal tersebut dikarenakan batubara menjadi sumber energi alternatif yang murah dan berlimpah.

Adapun manfaat batubara bagi masyarakat Tiongkok yaitu menjadi sumber tenaga pembangkit listrik. Batubara menjadi bahan bakar yang dikonversikan ke dalam bentuk uap panas dan menjadi sumber tenaga pembangkit listrik. Selain sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, batubara juga menjadi sumber tenaga untuk industri produk baja. Baja memiliki fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat seperti produk kesehatan, perlengkapan kesehatan, peralatan pertanian, model transportasi dan masih banyak lainnya. Setiap rumah yang berada di Tiongkok kebanyakan mereka

menggunakan batubara sebagai sumber energi untuk penghangat rumah mereka.

Batubara merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Tiongkok. Banyaknya batubara di Tiongkok membuat negara tersebut juga menjadi negara eksportir batubara yang besar. Konsumsi batubara di domestik maupun internasional yang mereka tanggung, membuat banyaknya perusahaan asing maupun investasi asing yang masuk guna membantu Tiongkok memenuhi pasar. Dengan tingginya pemenuhan pasar, perusahaan ataupun inventasi asing tersebut lebih gencar untuk lebih mengeksplorasi lingkungan yang dapat dijadikan batubara. Hal tersebut dikarenakan dengan tingginya permintaan akan batubara yang dimana didukung oleh sifat manusia yang tidak pernah ada puasnya.

Dengan tingginya permintaan itu pula, perusahaan sudah tidak lagi memikirkan dampak yang akan ditimbulkan bila mereka terus memenuhi permintaan konsumen. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa perusahaan multinasional memiliki prinsip yang kuat dan juga mereka memberikan tanggung jawab sosial kepada pembeli maupun masyarakat sekitar. Limbah dari batubara merupakan uap yang dihasilkan dimana menimbulkan polusi udara yang saat ini sedang dialami oleh Tiongkok.

Pada beberapa tahun yang lalu, pemerintah Tiongkok masih mengabaikan pentingnya lingkungan hidup di negaranya. Pemerintah justru berfokus pada peningkatan ekonomi dalam negerinya. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi guna meningkatkan citra negaranya. Dengan titik fokus tersebut, lingkungan hidup di Tiongkok menjadi tercemar dan rusak oleh aktor-aktor internasional. Sehingga peningkatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup di Tiongkok berjalan tidak seimbang.

Tidak hanya pemerintah saja yang dapat disalahkan, kebanyakan dari aktor-aktor internasional seperti perusahaan multinasional memiliki kesadaran yang sedikit mengenai

kelestarian lingkungan hidup. Tidak banyak dari mereka yang sadar betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi negara yang ditempati terutama masyarakat sekitar. Perusahaan multinasional memiliki prinsip yang dipegangnya sangat kuat. Prinsip tersebut yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan hal itulah, kebanyakan perusahaan multinasional menanggungkan tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat. tanggung jawab sosial tersebut salah satunya adalah limbah pabrik dari perusahaan tersebut.

Perusahaan BHP Billiton merupakan perusahaan pertambangan yang berpihak terhadap lingkungan hidup. BHP Billiton menyatakan bahwa dalam pendekatan berkelanjutannya, mereka mengutamakan keselamatan kerja pekerja, kesehatan pekerja, menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), serta bertanggung jawab pada lingkungan hidup. Perusahaan ini juga menerima penilaian Panel Antarpemerintah tentang perubahan iklim (IPCC).

Dengan berpihaknya BHP Billiton dengan lingkungan hidup, perusahaan ini memberikan syarat kepada pemerintah Tiongkok untuk ikut dalam standart lingkungan hidup perusahaan ini pada awal membuat perjanjian kerjasama tersebut. BHP Billiton yang memiliki prinsip berpihak terhadap lingkungan memandang lingkungan di Tiongkok yang sudah tercemar membuat perusahaan ini berniat menjalin kerjasama dengan Tiongkok. hal tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Tiongkok tetapi juga dapat menjaga lingkungan hidup di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok membuat sebuah kebijakan dimana kebijakan yang dibuat dalam bentuk undang-undang tersebut telah lebih terperinci dalam pemaparannya. Agar kebijakan tersebut dapat terwujud, beberapa otoritas administratif Tiongkok melakukan pengawasan dan mengelola masalah lingkungan yang muncul. Otoritas administratif yang membantu dalam menjalankan kebijakan tersebut antara lain adalah otoritas perlindungan lingkungan di level kabupaten dan level di atasnya, lembaga resmi pengawasan lingkungan, serta departemen yang bertanggung jawab sesuai dengan

bidangnya. Beberapa otoritas tersebut akan melakukan pengawasan terhadap perlindungan lingkungan dan bertanggung jawab secara administratif.

Dalam menjalankan undang-undang tersebut, pemerintah membuat kompensasi terhadap undang-undang mengenai Pencegahan dan Pengendalian Polusi Atmosfer. Kompensasi bagi para pelanggar yaitu mereka harus dapat menanggung segala gugatan dari pihak yang terkait. Pemerintah sendiri tidak menyuruh para pencemar agar membersihkan dan mengganti kerugian atas polusi atmosfer.

Denda yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu adanya penahanan administratif dan tanggung jawab pidana. Penahanan administratif diberikan kepada pelanggar yang menolak memenuhi perintah dari pemerintah dan mereka akan diharuskan untuk menghentikan pembangunan bisnis mereka yang dimana bisnis tersebut belum menjalani penilaian terhadap dampak lingkungan yang disesuaikan secara hukum. Apabila pelanggar secara ilegal tanpa izin pemerintah untuk membuang polusi melalui pipa bawah tanah, sumur atau lubang rembesan, mengubah atau memalsukan data pemantauan. Sedangkan, untuk sanksi pidana diberikan oleh semua orang yang telah melakukan pelanggaran aturan pemerintah Tiongkok, dan melakukan pencemaran lingkungan dengan level berat melalui pembuangan sampah radioaktif, limbah yang dapat menimbulkan penyakit, dan zat berbahaya maupun beracun.

Dengan adanya perubahan kebijakan yang dimana pemerintah saat ini lebih berfokus pada lingkungan hidup mampu menghasilkan hasil yang cukup. Dalam data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok (NBS) pada tahun 2016, mencatat bahwa tingkat penggunaan akan batubara pada tahun 2015 mengalami penurunan. Tercatat bahwa setidaknya 3.7% penggunaan batubara di Tiongkok mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2014 yang dimana juga mengalami penurunan sebesar 2.9%.